DAFTARI INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025

Daftar Kebutuhan Informasi Publik pada PPID Pelaksana yang terintegrasi dengan PPID Utama :

NO	JENIS INFORMASI	DESKRIPSI INFORMASI	BADAN PUBLIK PENANGGUNG JAWAB	BENTUK INFORMASI	SI BERKALA/ T/ SERTA MERTA	KETERANGAN
1.	PROFIL BADAN PUBLIK	a. ALAMAT	SETIAP OPD	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	BERKALA	
		b. TUPOKSI				
		c. STRUKTUR				
		d. GAMBARAN SINGKAT OPD				
		e. DAFTAR PERSONIL ASN (PNS DAN PPPK)				
2.	PROFIL PIMPINAN/PEJABAT	a. PROFIL	SETIAP OPD	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	BERKALA	a. Nama, Alamat, Unit, Latar Belakang, Pendidikan, Penghargaan yang telah ditrerima LHKPN tidak lagi menjadi dokumen yang dirahasiakan
		a.1. ESELON II				
		a.2. ESELON III				
		b. LHKPN				
		c. REKAPAN LKHPN	INSPEKTORAT			
3.	LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)		SETIAP OPD	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	BERKALA	
4.	PROGRAM KEGIATAN	a. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK)	SETIAP OPD	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	BERKALA	
		b. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)				
		c. AGENDA BADAN PUBLIK				
5.	INFORMASI KEUANGAN	a. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	SETIAP OPD			
		b. NERACA				
		c. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)				

		d. ASET DAN INVENTARIS	BPKPD	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	BERKALA	
		e. APBD f. RINGKASAN (RKA) RENCANA KERJA DAN ANGGARAN				
		g. RINGKASAN (DPA) DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN				
		h. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN	SETIAP OPD			
		i. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	Setiap OPD			
6.	LAPORAN AKSES INFORMASI	a. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI YANG DITERIMA b. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMINTAAN INFORMASI	DISKOMINFOTIK DAN OPD YANG MEMILIKI LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	BERKALA	
		c. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI YANG DIKABULKAN BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DAN PERMINTAAN INFORMASI YANG DITOLAK				
		d. ALASAN PENOLAKAN INFORMASI				
7.	REGULASI DAN KEBIJAKAN	a. SK KELEMBAGAAN	BAGIAN HUKUM DAN SETIAP OPD	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	BERKALA	Cakupan: Hanya aturan yang memiliki konsekuensi hukum atau pengaruh langsung terhadap masyarakat (publik) seperti surat edaran tertentu
		b. SK PPID PELAKSANA				
		c. REGULASI LAINNYA				
8.	PROSEDUR MEMPEROLEH INFORMASI	DOKUMEN TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	DISKOMINFOTIK	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	BERKALA	
9.	TATA CARA PENGADUAN PELANGGARAN OLEH BADAN PUBLIK	a. INFORMASI PENGADUAN SP4N LAPOR!	DISKOMINFOTIK	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	BERKALA	
		b. TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT				
	INFORMASI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA	a. INFORMASI PENGUMUMAN PENGADAAN BANG DAN JASA	UNIT LAYANAN	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada		
		b. PENGUMUMAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI APLIKASI SIRUP				

10.		c. PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN LKPP [illegible]) d. DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH e. DAFTAR KONTRAK	UNIT LAYANAN PENGADAAN	website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	BERKALA	
11.	INFORMASI KETENAGAKERJAAN	a. INFORMASI PENERIMAAN CPNS b. INFORMASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	BKPSDM	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	BERKALA	
		c. INFORMASI LOWONGAN KERJA	DISNAKER			
12.	INFORMASI PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT	INFORMASI MITIGASI KEADAAN DARURAT	BPBD DAN DINKES	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	BERKALA	
13.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	DISKOMINFOTIK	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	SETIAP SAAT	
14.	PRODUK HUKUM LANDASAN LEMBAGA	PERATURAN,KEPUTUSAN, DAN/ATAU KEBIJAKAN YANG MENGIKAT DAN/ATAU BERDAMPAK BAGI PUBLIK YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PUBLIK • CONTOH: PERATURAN DAERAH (PERDA), KEPUTUSAN KENAIKAN TARIF LAYANAN PUBLIK, KEBIJAKAN PEMBATASAN KENDARAAN, ATAU ATURAN SYARAT PEMBUATAN KTP. • SIFAT: WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT KARENA MENYANGKUT HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA.	SETIAP OPD	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	SETIAP SAAT	Surat keputusan dan peraturan - peraturan yang telah di terbitkan, maupun yang masih dalam proses pembuatan (JDIH)

15.	DOKUMEN PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	SURAT KONTRAK PERJANJIAN KERJA PIHAK KETIGA BERSERTA BUKTI DUKUNG	SETIAP OPD	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan	SETIAP SAAT	
16.	DOKUMEN PERIZINAN	a. DAFTAR IZIN YANG TELAH DITERBITKAN	DMPTSP DAN OPD YANG MEMILIKI DOKUMEN PERIZINAN	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	SETIAP SAAT	Dokumen memuat nama perusahaan/individu, jenis izin, masa berlaku)
		b. LAPORAN HASIL PENGAWASAN LAPANGAN TERHADAP PEMEGANG IZIN				
17.	PERENCANAAN PROGRAM	a. RENSTRA	SETIAP OPD	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	SETIAP SAAT	
		b. RENJA	SETIAP OPD			
18.	RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)		UNIT LAYANAN PENGADAAN	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	SETIAP SAAT	Dokumen Pengadaan barang jasa pada OPD melalui LPSE (tata cara, syarat, ketentuan,identitas pelaksana kontrak)
19.	DATA PERBENDAHARAAN ATAU INVENTARIS	a. DAFTAR INVENTARIS BARANG	SETIAP OPD	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	SETIAP SAAT	Tanah, Bangunan, Kendaraan Dinas
		b. DAFTAR ASET TETAP	SETIAP OPD			
20.	LAYANAN INFORMASI PPID		DISKOMINFOTIK	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	SETIAP SAAT	
21.	RINGKASAN LAPORAN PENGAWASAN INTERNAL	a. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN ATAU RINGKASAN LAPORAN AUDIT	SETIAP OPD	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	SETIAP SAAT	Jumlah, jenis, dan gambaran umum yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
		b. PENGHARGAAN	SETIAP OPD			

22.	LAPORAN SP4N LAPOR!	LAPORAN TAHUNAN SP4N LAPOR!	DISKOMINFOTIK	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	SETIAP SAAT	
23.	PENELITIAN DAN RISET	PUBLIKASI HASIL PENELITIAN DAN RISET YANG DIMILIKI OLEH OPD	SETIAP OPD	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	SETIAP SAAT	(BAGI YANG MEMILIKI PENELITIAN DAN RISET)
24.	HASIL SENGKETA INFORMASI		DISKOMINFOTIK	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	SETIAP SAAT	
25.	STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI		DISKOMINFOTIK	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	SETIAP SAAT	
26.	INFORMASI KEADAAN BENCANA ALAM	a. LAPORAN REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA	BPBD	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	SERTA MERTA	Bencana non-alam adalah bencana yang terjadi bukan karena faktor alam, melainkan akibat peristiwa seperti kegagalan teknologi, wabah penyakit, atau aktivitas manusia lainnya.
		b. PETA KAWASAN RAWAN BENCANA (KRB)	BPBD			
		c. STATUS TANGGAP DARURAT	BPBD			
		d. DATA JUMLAH KORBAN ATAU KERUSAKAN INFRASTRUKTUR	BPBD DAN PUPRP			
27.	INFORMASI BENCANA NON ALAM	a. DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL	SATPOL PP, DINKES, BPBD, PUPRP, DAMKAR, DINSOS	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	SERTA MERTA	
		b. LAPORAN PENANGAN BENCANA NON ALAM				
		c. INFOGRAFIS PERINGATAN KEWASPADAAN DAN PENANGANAN				
28.	INFORMASI BENCANA SOSIAL	a. LAPORAN PENANGAN KOFLIK	SATPOL PP	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada		Informasi peristiwa yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Peristiwa ini dapat

		b. DOKUMEN RENCANA AKSI PERDAMAIAN	SATPOL P	diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	SERTA MERTA	menimbulkan konflik, kerusuhan, gangguan keamanan, serta kerugian baik secara materi maupun korban jiwa
29.	INFORMASI PERSEBARAN PENYAKIT MENULAR	a. TABEL DISTRIBUSI KASUS PENYAKIT PER WILAYAH b. SURAT EDARAN KEWASPADAAN DINI PENYAKIT MENULAR	DINKES	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	SERTA MERTA	Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular
30.	INFORMASI KEAMANAN PANGAN	a. LAPORAN HASIL UJI LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN SECARA PERIODIK b. DAFTAR PRODUK MAKANAN YANG DITARIK DARI PEREDARAN c. INFOGRAFIS PERINGATAN DIRI KANDUNGAN BERBAHAYA PADA MAKANAN	DPKP DAN DINKES	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	SERTA MERTA	Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
31.	INFORMASI RENCANA GANGGUAN UTILITAS PUBLIK	a. SURAT PEMBERITAHUAN PEMADAMAN LISTRIK/AIR b. JADWAL PENGALIHAN ARUS LALU LINTAS c. PENGUMUMAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN/JEMBATAN	PERKIM DISHUB PUPRP	hard dan Softcopy (wajib diumumkan pada website / link OPD, terintegrasi dengan website PPID Utama)	SERTA MERTA	

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)	KETERANGAN
1.	INFORMASI BERKALA	Informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin sekurang-kurangnya 6 bulan sekali

2.	INFORMASI SETIAP SAAT	Informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik dan siap tersedia untuk bisa langsungdiberikan kepada pemohon informasi publik
3.	INFORMASI SERTAMERTA	Informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara sertamerta tanpa penundaan
4.	INFORMASI DIKECUALIKAN	Informasi yang tidak dapat diakses pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalan UU No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan telah melalui Uji konsekuensi